

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR:188.45/ /KEP/35.07.013/2017
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN
2018

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib

memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah

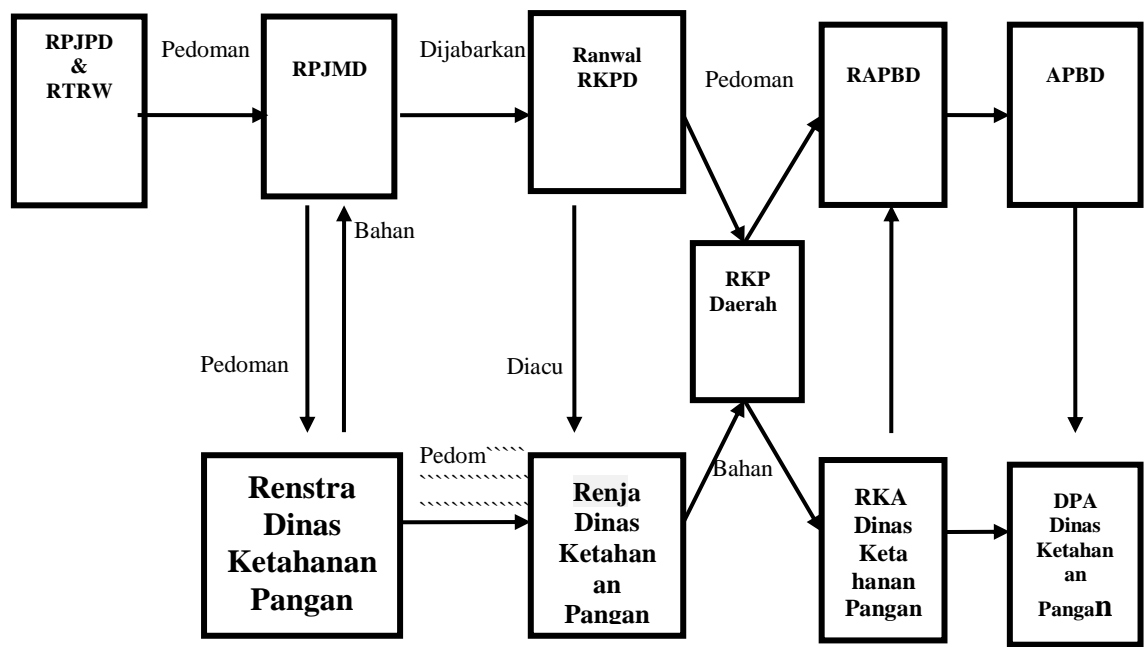
RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja PD juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Malang yaitu “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa”. Keterkaitan Renja K/L dan Renja Provinsi dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang digunakan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang terhadap sasaran Renja K/L dan Renja Provinsi sesuai dengan urusan ketahanan pangan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/838/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang;

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 4 program dan 33 kegiatan. Evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
	Urusan: Perencanaan									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	100%	-		-	-	85%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 buah	-	12 bulan	12 bulan	100%	3000 buah	3000 surat	20%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1464 OB	-	12 bulan	12 bulan	100%	264 OB	264 OB	18%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	-	12 bulan	12 bulan	100%	24 OB	24 OB	20%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	144 unit	-	12 bulan	12 bulan	100%	64 unit	64 unit	44%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	196 jenis	-	12 bulan	12 bulan	100%	44 jenis	44 jenis	22%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan ynng disedikaan (jenis)	33 jenis	-	12 bulan	12 bulan	100%	9 jenis	9 jenis	27%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	32 jenis	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 jenis	12 jenis	37.5%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	-	12 bulan	12 bulan	100%	2 jenis	2 jenis	100%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	124 HOK	-	12 bulan	12 bulan	100%	24 HOK	24 HOK	19%
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	892 HOK	-	12 bulan	12 bulan	100%	212 HOK	212 HOK	24%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)								
1	Pembangunan gedung kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	9 unit	-	9 unit	9 unit	100%	-	-	-
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	4 jenis (12 unit)	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 jenis (4 unit)	-	-	-	-	1 jenis (1 unit)	1 jenis (1 unit)	20%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	2 unit	-	2 mobil/1 tahun	2 mobil/1 tahun	100%	2 Unit	2 Unit	100%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	-	-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/survei kepuasan masyarakat) (buku)	770 buku (14 jenis)	-	12 bulan	12 bulan	100%	70 Buku (14 jeins)	70 Buku (14 jeins)	9%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	500 buku (10 jenis)	-	-	-	-	100 Buku (10 jenis)	100 Buku (10 jenis)	20%
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an)	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Tingkat Rumah Tangga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	100%	-						
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peta ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	1 buah	-	33 kec	33 kec. tiap thn dlm 1 thn	100 %	1 Buah	1 Buah	100%
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah laporan PPH Kabupaten Malang	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	1 Buah	100%
3	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah laporan dewan ketahanan pangan	30 Buku	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	30 Buku	30 Buku	100%
4	Pemanfaatan			-						100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
	Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	30 Kelompok		2 Kecamatan	2 Kecamatan	100 %	30 Kelompok	30 Kelompok	
5	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan (gabah) yang didistribusikan	10 Ton	-	33 Kecamatan	33 Kecamatan	100 %	10 Ton	10 Ton	100%
6	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa untuk persiapan dan penumbuhan replikasi desa mandiri pangan	4 Desa	-	2 Desa	2 desa	100 %	4 Desa	4 Desa	100%
7	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan desa yang dibina dan dikembangkan	2 Desa	-	37 Poktan	37 Poktan	100%	2 Desa	2 Desa	100%
8	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji mutu keamanan pangan	33 Kali	-	33 kecamatan	33 kecamatan	100 %	33 kali	33 kali	100%
9	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah sarana promosi panganekaragaman pangan	5 Kali	-	1 paket	1 paket	100 %	5 Kali	5 Kali	100%
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan	20 Buku	-	33 kecamatan	33 kecamatan	100 %	20 Buku	20 Buku	100%
11	Penanganan Konsumsi Pangan	Jumlah peta pola konsumsi pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	1 Buah	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
12	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah sarana promosi, penganekaragaman pangan	14 Kali	-	-	-	-	14 Kali	14 Kali	100%
13	Pengembangan pangan lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan Kecamatan	33 Kali					33 Kali	33 Kali	100%
14	Kelembagaan keamanan pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi satgas kewanamanan pangan	7 Kali					7 Kali	7 Kali	100%
15	Pengawasan keamanan pangan	Jumlah uji keamanan pangan segar	33 Kali	-	-	-	-	33 Kali	33 Kali	100%
16	Kerjasama dan informasi keamanan pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	33 Kali	-	-	-	-	33 Kali	33 Kali	100%
17	Pengembangan distribusi pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
18	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Jumlah bahan akses pangan (beras) yang didistribusikan	2 Paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
V	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Kelancaran Penyuluhan dan Pendampingan Petani pelaku agribisnis	100%	-	85%	80%	85%	85%		100 %
1	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok dan gapoktan	33 kec. tiap thn dlm 6 thn	-			100 %	-	33 kec. tiap thn dlm 5 thn	100 %
2	Penguatan Kelembagaan Kel. Petani Tembakau (DHBCT)	Jumlah kelembagaan kelpok tani	20 kelompok penguatan, 10 kel peningkatan kelembagaan usaha	-	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	-	20 kelom pok pengua tan, 10 kel peningkat an kelembag aan usaha	100 %
VI	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna n Lapangan	Cakupan pemenuhan profesionalitas penyuluh pertanian/perkebunan	100%	-	85%	80%	85%	85%		100 %
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah demplot yang tertangani	33 kec. tiap thn dlm 6 thn	-	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	-	33 kec. tiap thn dlm 5 thn	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah peningkatan produk pertanian	390 PPL dlm 6 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)	-	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	-	390 PPL/5 tahun (target 1 ds 1 pe nyuluh)	100 %
3	Penyuluh dan Pendampingan Bagi Pertanian / Perkebunan	Jumlah pendampingan petani	33 kec. tiap thn dlm 5 thn	-	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	-	33 kec. tiap thn dlm 5 thn	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang merupakan PD teknis dalam bidang ketahanan pangan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Malang termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pada Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang mengambil 4 (empat) pelayanan dasar untuk digunakan sebagai target kinerja pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2018 pelayanan dasar yang diambil adalah Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indikator meningkatnya kualitas pangan masyarakat.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan												
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) Persentase lumbung pangan desa	Pelayanan dasar Keter sediaan & Cadang an pa ngan	Persentase lumbung pangan desa	84.44%	86.67%	-	-	86,67%	88,89%	-	-	Jumlah lumbung pangan yang aktif dibagi Jumlah lumbung pangan yang ada dikali 100 %
2.	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Pelayanan dasar Distribusi & Akses Pangan	Persentase Coifisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen	CV < 10%	CV < 25%	-	-	CV < 10%	CV < 10%	-	-	Stabilisasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen diukur dengan nilai Coefisien Variasi (CV) pada nilai CV < 10 %. CV adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga dalam kurun waktu tertentu.
3.	Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan	Pelayanan dasar Penganeka- ragaman dan Keamanan Pangan	Persentase Nilai/ Skor Pola Pangan Harapan	97,33%	95.65%			97,33%	97,44%	-	-	Skor PPH konsumsi dibagi skor PPH yang ditargetkan dikali 100 %

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	aman (B2SA)											
4.	Meningkatkan ketersediaan pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Pelayanan dasar Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	45.45%	60%			-	60%	-	-	Jumlah sampel pangan segar yang aman dibagi Jumlah sampel pangan segar yang diambil dikali 100 %
5.	Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat	-	Skor PPH Ketersediaan	-	-	81,6	82,1	-	-	81,6	82,1	Pada tahun 2018 untuk menjadi 2 indikator dengan didukung 4 program

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	-	Skor PPH Konsumsi	-	-	88.2	88.3	-	-	88.2	88.3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi daerah bidang pangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 5 “Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”. Sasarannya “ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi daerah bidang pangan, maka dalam kegiatannya harus menggabungkan beberapa sektor pembangunan yaitu ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan sehingga perlu berkoordinasi dengan SKPD terkait sektor-sektor tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu koordinasi dengan SKPD lain terkait penanganan bersama hal-hal dalam bidang ketahanan pangan. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yaitu :

- Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran
- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan
- Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral

- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal
- Lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian belum berperan optimal
- Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat
- Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras
- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena tidak disertai dengan adanya Peraturan Perundangan
- Adanya kebijakan Pasar Global

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
- Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Malang
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog
- Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog, TNI, Kementrian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Lembaga Pembelian Gabah (serapan Gabah Tani dari Luar Kualitas).
- Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin
- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang

beragam dan bermutu

- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan
- Adanya Kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal penerapan prinsip partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan ketahanan pangan;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa, puting beliung);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang juga mengalami perubahan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, diantaranya:

- penambahan jabatan eselon IV di setiap Bidang;
- pengurangan urusan yang ditangani (Urusan Penyuluhan);
- penambahan urusan pangan yang lebih detail;
- perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) serta kegiatan-kegiatan yang mendukungnya.

2. Berkaitan bidang dan sub bidang baru yang menangani ketahanan pangan, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu untuk dialokasikan. Untuk itu perlu diusulkan penambahan program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan diantaranya :
 - a. Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan Dengan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal, Analisa Ketersediaan Pangan.
 - b. Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan Dengan Kegiatan Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan, Penanganan Cadangan Pangan Daerah, Penanganan Distribusi Pangan.
 - c. Program Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan Dengan Kegiatan Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan, Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Pangan Pokok Lokal
 - d. Program Keamanan Pangan Dengan Kegiatan Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dengan Kegiatan Analisa Kondisi Ketahanan Pangan
4. Adanya perubahan pada indikator program dan kegiatan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan pada awal tahun, di samping menyesuaikan RKA dan DPA yang sudah disusun, juga menyesuaikan situasi keadaan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan, perlu dilakukan review rancangan rencana program dan kegiatan yang mengakibatkan review RKPD. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DKP	Persentase Cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	628.607.000	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DKP	Persentase Pemenuhan Operasioanal Perkantoran (%)	100%	599.095.000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	3000 buah	9.600.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	9.600.000	
	2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	DKP	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan	22.080.000	2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	DKP	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	20.280.000	
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DKP	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	312 OB	304.860.000	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DKP	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	300 OB	373.860.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DKP	Jumlah petugas kebersihan	12 bulan	18.045.000	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DKP	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24OB	4.800.000	
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DKP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan	55 unit	10.000.000	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DKP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 unit	3.750.000	
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DKP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	48 jenis	30.320.000	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DKP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	38 jenis	25.940.000	
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7 jenis	15.005.000	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	6 jenis	10.205.000	
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	5 jenis	5.550.000	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	5 jenis	3.050.000	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 bulan	7.200.000	9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	DKP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	2 jenis	3.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				undangan yang disediakan						undangan yang disediakan (jenis)			
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	39 OK	88.650.000	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	25 HOK	75.125.000	
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	199 OK	54.135.000	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DKP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	170 HOK	65.225.000	
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	DKP	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	12 bulan	63.162.000	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	DKP	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	45 HOK	3.660.000	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	181.400.000	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang	100%	78.495.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
										Aparatur (%)			
	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	DKP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	75.000.000	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	DKP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis (2 unit)	43.295.000	
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	2 unit	54.400.000	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	2 unit	23.200.000	
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DKP	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 unit	52.000.000	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DKP	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis (3 unit)	12.000.000	
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DKP	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan	100%	99.890.000	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	DKP	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja	100%	100.990.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		dan Keuangan		kinerja perangkat daerah yang tepat waktu (%)				dan Keuangan		perangkat daerah yang tepat waktu (%)			
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	Jumlah dokumen SAKIP (buku)	18 jenis	66.865.000	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/profile kinerja PD/survey kepuasan masyarakat) (buku)	175 buku (14 jenis)	72.150.000	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	DKP	Jumlah Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	100 Buku	33.025.000	2	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	DKP	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	100 buku (10 jenis)	28.840.000	
4		Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan		Persentase jumlah lumbung pangan yang aktif	87,50%	1.200.110.000	3	Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan		Persentase surplus ketersediaan pangan	73%	423.000.000	
	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kab Malang	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	5 kecamatan	423.504.000	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kab Malang	Jumlah peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	1 buah	127.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	2	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Kab Malang	Jumlah desa untuk Replika Desa Mandiri Pangan	4 Desa	599.329.000	2	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Kab Malang	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	1 desa	217.200.000	
	3	Analisa Ketersediaan Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan untuk mengetahui kondisi Ketersediaan Pangan Daerah	30 Buku	73.582.000	3	Analisa Ketersediaan Pangan	Kab Malang	Jumlah analisis Ketersediaan Pangan	30 buku	78.600.000	
	4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab Malang	Jumlah desa untuk Replika Desa Mandiri Pangan	4 Desa	103.695.000							
4		Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab Malang	Persentase Coefisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen	<25%	835.666.400	4	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kab Malang	Persentase Cadangan Pangan	0.034%	331.400.000	
	1	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab Malang	Jumlah dan Informasi Harga Pangan	5 paket	304.737.800	1	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33	24 buku	103.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
										Kecamatan			
	2	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Kab Malang	Jumlah dan Informasi kondisi cadangan pangan	5 paket	252.457.000	2	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Kab Malang	Jumlah cadangan pangan masyarakat	8 ton	106.650.000	
	3	Penanganan Distribusi Pangan	Kab Malang	Jumlah Kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang ditangani	8 paket	278.471.600	3	Penanganan Distribusi Pangan	Kab Malang	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 unit	121.600.000	
5		Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kab Malang	Persentase Kenaikan skor pola pangan harapan	95,78%	2.528.601.000	5	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kab Malang	Cakupan Skor PPH Konsumsi	88.2	1.494.850.000	
	1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan PPH Kabupaten Malang	10 Buku	577.400.000	1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	2 buah	209.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kab Malang	Jumlah kelompok yang melaksanakan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	35 kelompok	543.740.000	2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kab Malang	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	26 Kelompok	790.350.000	
	3	Promosi Pekarangan Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan jumlah lomba cipta menu, karangkitri, dan kegiatan Gerakan Makan Berbasis Pangan Lokal	32 Kali	1.030.769.000	3	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan	16 kali	418.850.000	
	4	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Kab Malang	Jumlah kelompok pengembangan pangan pokok lokal	41 kali	376.692.000	4	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Kab Malang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	20 kali	76.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
5		Program Keamanan Pangan	Kab Malang	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	62%	1.210.916.000	6	Program Keamanan Pangan	Kab Malang	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	62%	384.570.000	
	1	Kelembagaan Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah pembentukan, pemantauan dan pembinaan satgas keamanan pangan	19 kali	258.472.500	1	Kelembagaan Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	10 kelompok	94.420.000	
	2	Pengawasan Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah sampel pangan segar yang diuji, jumlah demplot dan penyuluhan keamanan pangan segar	33 paket	723.122.000	2	Pengawasan Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	20 buku	211.150.000	
	3	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan dan pertemuan koordinasi keamanan pangan yang dilaksanakan	36 Kali	229.321.500	3	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Kab Malang	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	12 kali	79.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kab Malang	Persentase laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%	131.499.000	7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kab Malang	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%	87.600.000	
	1	Kajian dan perumusan kebijakan ketahanan pangan	Kab Malang	Jumlah Laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	30 buku	131.499.000	1	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Kab Malang	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	30 Buku	87.600.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018 tertuang dalam tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
DATA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALANG

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan pengembangan KRPL	Kec. Karangploso	Jumlah Kegiatan KRPL yang tertangani	2 Desa (Desa Ampeldinto dan desa kepuh harjo)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda ketujuh pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;

- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Sedangkan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Timur pembangunan ketahanan pangan yang dikaitkan dengan visi, misi, serta program tertuang dalam misi kedua yaitu: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan serta Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada Tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini mengintruksikan pada semua unit pemerintah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah : Meningkatkan pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya kuantitas pangan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pangan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melaksanakan 8 (Delapan) program dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
5. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
6. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
7. Program Keamanan Pangan
8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
18. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
19. Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal;
20. Analisa Ketersediaan Pangan;
21. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;
22. Penanganan Cadangan Pangan Daerah;
23. Penanganan Distribusi Pangan;
24. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan;
25. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
26. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
27. Pengembangan Pangan Pokok Lokal;
28. Kelembagaan Kemanana Pangan;
29. Pengawasan Keamanan Pangan;
30. Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
31. Analisa Kondisi Ketahanan Pangan.

Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang yang

mendukung program responsif gender adalah Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan, Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Program Keamanan Pangan. Program tersebut merupakan program yang mengkoordinasikan ketahanan pangan antar pelaku pembangunan baik unsur pemerintah, swasta, kelompok tani, kelompok tani wanita, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan									
2.03.2.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	DKP	100%	599.095.000	APBD		100%	659.004.500	
2.03.2.03.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DKP	3000 buah	9.600.000	APBD		3000 buah	10.560.000	
2.03.2.03.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	DKP	12 bulan	20.280.000	APBD		12 bulan	22.308.000	
2.03.2.03.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DKP	300 OB	373.860.000	APBD		300 OB	411.246.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	DKP	24 OB	4.800.000	APBD		24 OB	5.280.000	
2.03.2.03.1.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	DKP	20 unit	3.750.000	APBD		20 unit	4.125.000	
2.03.2.03.1.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DKP	38 jenis	25.940.000	APBD		38 jenis	28.534.000	
2.03.2.03.1.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	DKP	6 jenis	10.205.000	APBD		6 jenis	11.225.500	
2.03.2.03.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DKP	5 jenis	3.050.000	APBD		5 jenis	3.355.000	
2.03.2.03.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DKP	2 jenis	3.600.000	APBD		2 jenis	3.960.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DKP	25 HOK	75.125.000	APBD		25 HOK	82.637.500	
2.03.2.03.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DKP	170 HOK	65.225.000	APBD		170 HOK	71.747.500	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	DKP	45 HOK	3.660.000	APBD		45 HOK	4.026.000	
2.03.2.03.1.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	DKP	100%	181.400.000	APBD		100%	151.574.500	
2.03.2.03.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DKP	1 jenis (2 unit)	43.295.000	APBD		1 jenis (4 unit)	112.854.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.2.03.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DKP	2 unit	23.200.000	APBD		2 unit	25.520.000	
2.03.2.03.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DKP	2 jenis (3 unit)	12.000.000			2 jenis (3 unit)	13.200.000	
2.03.2.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	DKP	100%	100.990.000	APBD		100%	111.089.000	
2.03.2.03.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DKP	175 buku (14 jenis)	72.150.000	APBD		175 buku (14 jenis)	79.365.000	
2.03.2.03.1.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DKP	100 buku (10 jenis)	28.840.000	APBD		100 buku (10 jenis)	31.724.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase surplus ketersediaan pangan		73%	423.000.000	APBD		74%	465.300.000	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	Kab Malang	1 buah	127.200.000	APBD		1 buah	139.920.000	
	Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Kab Malang	1 Desa	217.200.000	APBD		1 Desa	238.920.000	Gender
	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisis Ketersediaan Pangan	Kab Malang	30 buku	78.600.000	APBD		30 buku	86.460.000	
	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan	Kab Malang	0.034%	331.400.000	APBD		0.034%	364.540.000	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	Kab Malang	24 buku	103.150.000	APBD		24 buku	113.465.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Kab Malang	8 ton	106.650.000	APBD		8 ton	117.315.000	Gender
	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	Kab Malang	3 unit	121.600.000	APBD		3 unit	133.760.000	
	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Cakupan Skor PPH Konsumsi	Kab Malang	88.2	1.494.850.000	APBD		88.3	1.644.335.000	
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Ponsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	Kab Malang	2 buah	209.550.000	APBD		2 buah	230.505.000	
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	Kab Malang	26 kelompok	790.350.000	APBD		26 kelompok	869.385.000	Gender
	Promosi Pekarangan Konsumsi Pangan	Jumlah sarana promosi penganekaragaman pangan	DKP	16 kali	418.850.000	APBD		16 kali	460.735.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	Kab Malang	20 kali	76.100.000	APBD		20 kali	83.710.000	
	Program Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	Kab Malang	62%	384.570.000	APBD		64%	438.027.000	
	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	Kab Malang	10 kelompok	94.420.000	APBD		10 kelompok	118.862.000	
	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	Kab Malang	20 buku	211.150.000	APBD		20 buku	232.265.000	Gender
	Kerja sama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	Kab Malang	12 kali	79.000.000	APBD		12 kali	86.900.000	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	Kab Malang	100%	87.600.000	APBD		100%	96.360.000	
	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	Kab Malang	30 buku	87.600.000	APBD		30 buku	96.360.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Ket.
								Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH					3.500.000.000		JUMLAH	3.930.230.000		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja ini terdapat 8 program dan 31 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MALANG



AGUS PRIYANTO